

## Pengaruh Tingkat Kemiskinan dan Putus Sekolah terhadap Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Sumatera Selatan

Nur Rahma Al Zaryah<sup>1\*</sup>, Bernadette Robiani<sup>2</sup>, Siti Rohima<sup>3</sup>, Anna Yulianita<sup>4</sup>, Yeni Anggraini<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Ilmu Ekonomi, Universitas Sriwijaya, Jl. Srijaya Negara Kec. Ilir Barat 1, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30128.

E-mail: [nurrahmaalzaryah@gmail.com](mailto:nurrahmaalzaryah@gmail.com)

\*Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3430>

### ARTICLE INFO

#### Article history

Received: 20 October 2025

Revised: 25 October 2025

Accepted: 25 November 2025

#### Kata kunci:

Tingkat Kemiskinan, Putus Sekolah, Partisipasi Angkatan Kerja

#### Keywords:

Poverty Rate, School Dropouts, Labor Force Participation



### ABSTRACT

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh Tingkat Kemiskinan dan Putus Sekolah terhadap Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Sumatera Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan model terbaik yaitu Random Effect Model (REM), yang ditentukan berdasarkan hasil uji Chow dan Hausman. Data yang digunakan mencakup 17 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan selama periode 2020–2023, dengan variabel dependen partisipasi angkatan kerja serta dua variabel independen, yaitu tingkat kemiskinan dan angka putus sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap partisipasi angkatan kerja, sedangkan putus sekolah berpengaruh negatif namun tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan tingkat kemiskinan akan menurunkan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ekonomi produktif, sedangkan pengaruh putus sekolah lebih terlihat secara tidak langsung melalui penurunan kualitas tenaga kerja. Temuan ini sejalan dengan teori labour supply dan human capital, yang menyatakan bahwa kesejahteraan ekonomi dan pendidikan merupakan faktor utama dalam mendorong produktivitas tenaga kerja. Berdasarkan hasil penelitian, direkomendasikan agar pemerintah memperkuat kebijakan pengentasan kemiskinan, memperluas akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah, serta meningkatkan pelatihan vokasional bagi masyarakat miskin. Upaya tersebut selaras dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) poin ke-8 tentang Decent Work and Economic Growth, yang menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Provinsi Sumatera Selatan.

*This study was conducted to determine the effect of poverty levels and school dropouts on labor force participation in South Sumatra Province. The research method used was panel data regression analysis with the best model, namely the Random Effect Model (REM), which was determined based on the results of the Chow and Hausman test. The data used covered 17 districts/cities in South Sumatra Province during the period 2020–2023, with the dependent variable being labor force participation and two independent variables, namely the poverty rate and the dropout rate. The results showed that the poverty rate had a negative and significant effect on labor force participation, while school dropouts had a negative but insignificant effect. This suggests that increasing poverty levels will reduce community involvement in productive economic activities, while the effect of school dropouts is more visible indirectly through a decline in labor quality. These findings are in line with the labor supply and human capital theories, which state that economic welfare and education are the main factors in driving labor productivity. Based on the results of the study, it is recommended that the government strengthen poverty alleviation policies, expand access to education for the school-age population, and improve vocational training for the*

*poor. This effort is in line with the objective of Sustainable Development Goals (SDGs) point 8 on Decent Work and Economic Growth, which emphasizes the importance of improving the quality of human resources to encourage inclusive and sustainable economic growth in South Sumatra Province.*



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

**How to Cite:** Nur Rahma Al Zaryah, et al (2025). Pengaruh Tingkat Kemiskinan dan Putus Sekolah terhadap Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Sumatera Selatan 4(2) 10985- 10995 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3430>

## PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi suatu daerah tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya alam, tetapi juga oleh kemampuan sumber daya manusia dalam berpartisipasi aktif di pasar kerja (Djadjuli, 2018). Partisipasi angkatan kerja menjadi indikator penting yang menunjukkan sejauh mana penduduk usia kerja dapat terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif, baik di sektor formal maupun informal (Nursalamah, 2025). Tingkat partisipasi yang tinggi menandakan adanya kesempatan kerja yang luas dan kualitas sumber daya manusia yang baik, sedangkan rendahnya partisipasi mencerminkan masih adanya kendala struktural seperti pengangguran, rendahnya pendidikan, serta keterbatasan akses terhadap lapangan kerja yang layak (Meytriana, et al., 2025).

Partisipasi angkatan kerja merupakan indikator penting dalam menggambarkan kondisi ketenagakerjaan suatu daerah (Rahmayani, et al., 2025). Tingkat partisipasi yang tinggi menunjukkan bahwa penduduk usia kerja mampu berkontribusi dalam kegiatan ekonomi, sedangkan rendahnya partisipasi dapat mengindikasikan adanya hambatan struktural maupun social (Ariesti & Asmara, 2023). Di Provinsi Sumatera Selatan, dinamika partisipasi angkatan kerja sangat dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi, terutama tingkat kemiskinan dan angka putus sekolah (Al Barabasi & Atmanti, 2025). Di sisi lain, angka putus sekolah yang masih relatif tinggi menyebabkan banyak individu usia produktif masuk ke pasar kerja tanpa memiliki pendidikan atau keterampilan yang memadai, yang berdampak pada kualitas tenaga kerja di daerah tersebut (Febrianty, et al., 2025).

Indonesia terus berupaya menekan angka pengangguran dan meningkatkan kualitas tenaga kerja agar mampu bersaing di era global (Handayani, 2015). Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa partisipasi angkatan kerja di berbagai daerah belum merata. Beberapa provinsi masih menghadapi tantangan serius seperti tingginya angka kemiskinan, rendahnya pendidikan, serta terbatasnya keterampilan tenaga kerja (Sagara, et al., 2025). Kondisi tersebut menjadi penghambat bagi peningkatan produktivitas dan pemerataan ekonomi antarwilayah. Upaya pemerintah melalui berbagai program peningkatan pendidikan, pelatihan kerja, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi bagian penting dalam memperkuat partisipasi angkatan kerja di seluruh Indonesia (Azizah, et al., 2015).

Gambar 1. Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Sumatera Selatan



19 yang menurunkan kesempatan kerja, terutama di sektor informal. Rendahnya tingkat pendidikan dan tingginya angka kemiskinan turut menjadi faktor penghambat keterlibatan penduduk usia produktif dalam pasar kerja, karena banyak tenaga kerja tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Dengan demikian, permasalahan utama partisipasi angkatan kerja di Provinsi Sumatera Selatan terletak pada rendahnya kualitas tenaga kerja, ketimpangan antarwilayah, serta keterbatasan akses terhadap lapangan kerja yang layak, yang secara keseluruhan berpengaruh terhadap produktivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Salah satu faktor yang memengaruhi fluktuasi tersebut adalah meningkatnya angka kemiskinan, terutama pascapandemi COVID-19, yang membuat sebagian masyarakat usia produktif terdorong untuk bekerja lebih awal demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga (Araafi, et al., 2024). Namun, di sisi lain, tingginya angka putus sekolah menyebabkan sebagian besar tenaga kerja yang masuk ke pasar kerja tidak memiliki keterampilan dan pendidikan yang memadai, sehingga sulit terserap di sektor formal. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemiskinan dan putus sekolah memiliki hubungan yang erat terhadap perubahan tingkat partisipasi angkatan kerja di Provinsi Sumatera Selatan, di mana kedua faktor tersebut tidak hanya memengaruhi jumlah tenaga kerja yang tersedia, tetapi juga kualitas dan produktivitasnya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Penelitian ini berlandaskan pada teori partisipasi angkatan kerja, teori modal manusia, dan teori kemiskinan yang saling berkaitan dalam menjelaskan hubungan antara kemiskinan, putus sekolah, dan tingkat partisipasi angkatan kerja di Provinsi Sumatera Selatan. Menurut teori partisipasi angkatan kerja, tekanan ekonomi akibat kemiskinan mendorong masyarakat usia produktif untuk bekerja lebih awal, sedangkan teori modal manusia menjelaskan bahwa tingginya angka putus sekolah menurunkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja karena kurangnya keterampilan dan pendidikan. Sementara itu, teori kemiskinan menegaskan bahwa keterbatasan ekonomi tidak hanya mendorong partisipasi kerja, tetapi juga menghambat akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang layak. Oleh karena itu, kemiskinan dan putus sekolah berpengaruh secara simultan terhadap partisipasi angkatan kerja, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas tenaga kerja di Provinsi Sumatera Selatan.

Penelitian ini juga sejalan dengan (Iswara, et al., 2023) (Christy, et al., 2024) (Azmi & Cholily, 2023) (Fitria & Novita, 2024) (Audilla & Rachmawati, 2025) (Asmara & Wahed, 2024) menunjukkan hasil positif positifnya adalah bahwa kemiskinan dan putus sekolah dapat mendorong peningkatan partisipasi angkatan kerja, terutama di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah yang terdorong untuk bekerja lebih awal demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Kondisi ini menunjukkan bahwa tekanan ekonomi berperan sebagai faktor pendorong keterlibatan masyarakat usia produktif dalam aktivitas ekonomi, sehingga meningkatkan tingkat partisipasi kerja secara kuantitatif di suatu daerah. Sementara penelitian (Xayavong & Pholphirul, 2018) (Ghignoni, et al., 2019) (Das, 2022) (Lindemann & Gangl, 2025) (Brunello & Paola, 2014) (Mussida, et al., 2019) (Rammohan & Tohari, 2023) (Korotaj, et al., 2024) (Bratti, et al., 2022) menunjukkan hasil negatif bahwa kemiskinan dan putus sekolah berdampak pada menurunnya kualitas partisipasi angkatan kerja, karena individu yang memiliki pendidikan rendah cenderung bekerja di sektor informal dengan upah kecil dan produktivitas rendah. Selain itu, putus sekolah menyebabkan keterbatasan keterampilan dan kesempatan kerja, sehingga memperbesar risiko pengangguran dan memperburuk siklus kemiskinan. Dengan demikian, meskipun jumlah partisipasi kerja meningkat, kualitas dan daya saing tenaga kerja justru menurun dalam jangka panjang.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, hipotesis dalam penelitian ini menyatakan bahwa tingkat kemiskinan dan putus sekolah berpengaruh signifikan terhadap partisipasi angkatan kerja di Provinsi Sumatera Selatan. Kemiskinan diperkirakan memiliki pengaruh positif, karena tekanan ekonomi mendorong masyarakat usia produktif untuk lebih cepat masuk ke pasar kerja guna memenuhi kebutuhan hidup. Sebaliknya, tingkat putus sekolah diperkirakan berpengaruh negatif, karena rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan menurunkan kualitas serta daya saing tenaga kerja di pasar kerja formal. Dengan menggunakan pendekatan analisis regresi data panel, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif bagaimana kedua variabel tersebut memengaruhi partisipasi angkatan kerja selama periode 2020–2023 di Provinsi Sumatera Selatan.

Analisis ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademis terkait dinamika ketenagakerjaan di Indonesia, khususnya dalam konteks sosial ekonomi daerah, serta memberikan dasar empiris yang kuat bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan strategi peningkatan kualitas dan pemerataan kesempatan kerja. Selain itu, penelitian ini juga memberikan perspektif baru mengenai keterkaitan antara

kemiskinan, pendidikan, dan ketenagakerjaan dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) poin ke-8, yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam menekan angka kemiskinan, menurunkan tingkat putus sekolah, serta meningkatkan partisipasi angkatan kerja yang berkualitas di Provinsi Sumatera Selatan.

## METODE

Jenis data yang di gunakan pada penelitian ini adalah data kuantitatif, dimana data yang dapat dihitung dan diukur yang secara numerik berupa angka-angka atau bilangan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari BPS sebagai salah pusat penelitian statistik di Indonesia di berbagai kabupaten. Penelitian ini berfokus pada 17 kabupaten yang ada di provinsi Sumatera Selatan: Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ilir, Muara Enim, Lahat, Musi Rawas, Musi Banyuasin, Banyuasin, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Ilir, Emoat Lawang, Pali, Musi Rawas Utara, Palembang, Prabumulih, Pagar Alam dan Lubuk Linggau dari tahun 2020 hingga tahun 2023 atau selama 4 tahun. Dari data-data tersebut kemudian akan dilakukan pengujian menggunakan aplikasi Eviews versi 12.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan yang berjumlah 17 wilayah administratif. Periode penelitian mencakup tahun 2020 hingga 2023, sehingga total unit analisis berjumlah 68 (17 kabupaten/kota  $\times$  4 tahun).

Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, yaitu penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu. Kriteria pemilihan sampel adalah kabupaten/kota yang memiliki data lengkap dan konsisten untuk variabel selama tahun 2020–2023. Berdasarkan kriteria tersebut, seluruh 17 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan memenuhi syarat sehingga dijadikan sebagai sampel penelitian. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan variabel Partisipasi Angkatan Kerja (Y) sebagai variabel dependen, serta Tingkat Kemiskinan (X1) dan Putus Sekolah (X2) sebagai variabel independen. Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan aspek pemberdayaan perempuan dan laki-laki serta ketimpangan gender yang mencakup akses terhadap pendidikan dan kesehatan sebagai bagian dari konteks sosial penelitian.

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan bantuan aplikasi EViews 12. Analisis data panel merupakan metode yang menggabungkan data antar waktu (time series) dan antar individu (cross section) untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif terhadap dinamika hubungan antarvariabel.

Pendekatan metodologis dalam analisis regresi data panel disesuaikan dengan karakteristik data dan reliabilitas antarvariabel. Dalam konteks ini, terdapat tiga pendekatan utama yang digunakan dalam analisis data panel, yaitu Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM). Pemilihan model terbaik di antara ketiganya dilakukan melalui uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier (LM). Berikut model regresi data panel yang digunakan dalam penelitian ini:

$$PAK_{it} = \beta_0 + \beta_1 TK + \beta_2 PS + e_{it}$$

Dimana:  $\beta$  adalah konstanta; PAK adalah partisipasi angkatan kerja; TK adalah tingkat kemiskinan; PS adalah putus sekolah;  $i$  adalah cross section;  $t$  adalah time series; dan  $e$  adalah error term. Karena terdapat perbedaan satuan dan besaran variabel bebas dalam persamaan regresi, maka harus dibangun dengan menggunakan model logaritma natural

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

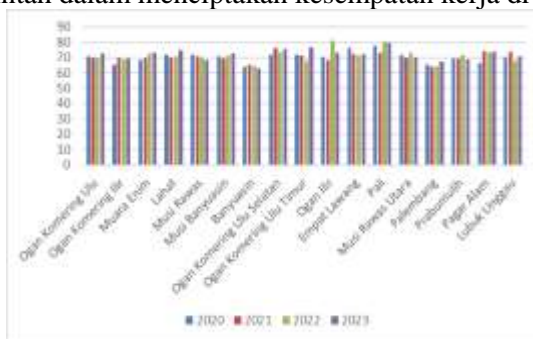
Variabel	Definisi	Satuan	Sumber
Partisipasi Angkatan Kerja (PAK)	Partisipasi Angkatan Kerja (PAK) merupakan persentase penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi, baik bekerja maupun mencari pekerjaan, terhadap total penduduk usia kerja. Variabel ini menggambarkan sejauh mana penduduk usia produktif berkontribusi dalam pasar tenaga kerja.	Persen (%)	BPS
Tingkat Kemiskinan (TK)	Tingkat kemiskinan menggambarkan persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, yaitu mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimum seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan.	Persen (%)	BPS
Putus Sekolah (PS)	Putus sekolah adalah kondisi ketika individu berhenti atau tidak melanjutkan pendidikan formal pada jenjang tertentu sebelum lulus. Variabel ini mencerminkan rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja, yang dapat memengaruhi tingkat partisipasi mereka di pasar kerja.	Persen (%)	BPS

Sumber: Author Compilation, (2025)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Pergerakan Tren Variabel Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Sumatera Selatan*

Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Sumatera Selatan mencerminkan sejauh mana penduduk usia produktif terlibat dalam kegiatan ekonomi, baik sebagai pekerja maupun pencari kerja, yang menjadi indikator penting dalam menilai kondisi ketenagakerjaan daerah. Tingkat partisipasi yang tinggi menunjukkan kemampuan wilayah dalam memanfaatkan potensi sumber daya manusia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah dapat mencerminkan adanya kendala struktural seperti keterbatasan lapangan kerja, rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan, atau faktor sosial ekonomi yang menghambat akses masyarakat terhadap pekerjaan yang layak. Oleh karena itu, tingkat partisipasi angkatan kerja memberikan gambaran menyeluruh tentang dinamika pasar kerja, produktivitas penduduk, serta efektivitas kebijakan pemerintah dalam menciptakan kesempatan kerja di Provinsi Sumatera Selatan.



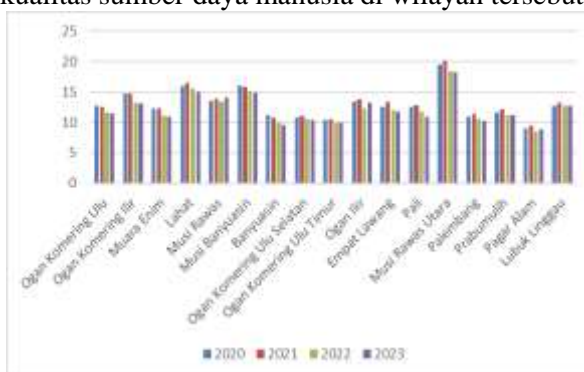
Gambar 2. Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan Gambar 2, tingkat partisipasi angkatan kerja di Provinsi Sumatera Selatan pada periode 2020–2023 menunjukkan tren fluktuatif di berbagai kabupaten/kota. Secara umum, partisipasi angkatan kerja cenderung stabil dengan rata-rata di atas 70 persen, menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk usia produktif telah terlibat dalam kegiatan ekonomi. Kabupaten seperti Ogan Ilir, Banyuwasin, dan Ogan Komering Ilir mencatat tingkat partisipasi yang relatif tinggi dan stabil, yang mengindikasikan kondisi ekonomi daerah yang cukup baik dan peluang kerja yang lebih terbuka. Sementara itu, beberapa daerah seperti Lahat, Musi Rawas, dan Empat Lawang menunjukkan partisipasi yang sedikit menurun pada tahun-tahun tertentu, yang bisa mencerminkan keterbatasan lapangan kerja dan faktor sosial ekonomi yang memengaruhi keputusan masyarakat untuk bekerja (Audilla & Rachmawati, 2025).

Fluktuasi ini dapat dikaitkan dengan dua faktor utama, yaitu tingkat kemiskinan dan angka putus sekolah. Tingginya tingkat kemiskinan dapat mendorong sebagian penduduk untuk segera masuk ke pasar kerja, bahkan sebelum menyelesaikan pendidikan formalnya, sehingga meningkatkan partisipasi angkatan kerja meski dengan kualitas tenaga kerja yang rendah. Sebaliknya, angka putus sekolah yang tinggi juga dapat menurunkan kualitas partisipasi tenaga kerja karena banyaknya pekerja dengan keterampilan terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara kuantitatif partisipasi angkatan kerja di Sumatera Selatan cukup tinggi, secara kualitatif masih menghadapi tantangan terkait produktivitas dan kompetensi tenaga kerja (Iswara, et all., 2023).

### **Pergerakan Tren Variabel Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan**

Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan mencerminkan kondisi kesejahteraan masyarakat dan kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar penduduknya. Indikator ini menunjukkan persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, yaitu mereka yang pendapatannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Tingginya tingkat kemiskinan menggambarkan rendahnya akses terhadap lapangan kerja yang layak, pendidikan, serta fasilitas ekonomi, yang pada akhirnya berdampak terhadap rendahnya produktivitas dan kualitas sumber daya manusia di wilayah tersebut.



Gambar 3. Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan

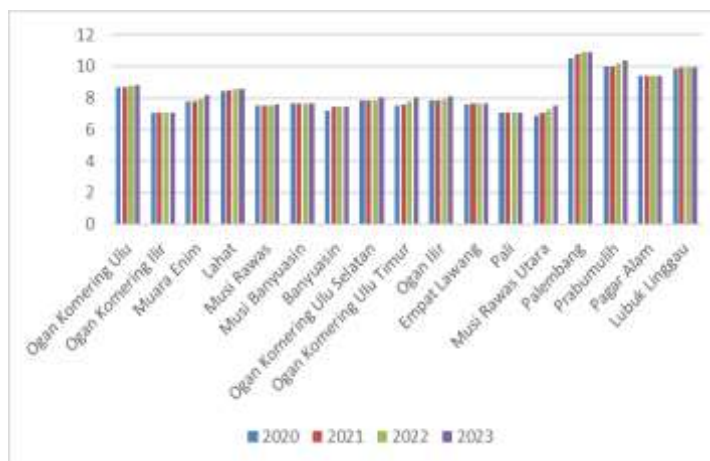
Berdasarkan Gambar 3 di atas, tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan selama periode 2020–2023 menunjukkan tren yang cenderung menurun di sebagian besar kabupaten/kota, meskipun masih terdapat variasi antarwilayah. Kabupaten Musi Rawas Utara dan Lahat tercatat memiliki tingkat kemiskinan tertinggi dibandingkan daerah lainnya, dengan persentase yang mencapai sekitar 18–20 persen pada awal periode, meskipun mengalami sedikit penurunan di tahun-tahun berikutnya. Sementara itu, kota-kota seperti Palembang dan Prabumulih menunjukkan tingkat kemiskinan yang relatif rendah dan stabil, di bawah 10 persen, mencerminkan tingkat perekonomian yang lebih baik serta akses lapangan kerja yang lebih luas (Azmi & Cholily , 2023).

Penurunan angka kemiskinan di sebagian besar wilayah menunjukkan adanya perbaikan kondisi ekonomi dan keberhasilan program pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah. Namun, fluktuasi yang masih terjadi di beberapa kabupaten mengindikasikan adanya kesenjangan pembangunan antarwilayah, terutama antara daerah perkotaan dan pedesaan. Faktor seperti ketimpangan kesempatan kerja, rendahnya tingkat pendidikan, serta keterbatasan akses terhadap fasilitas ekonomi dan sosial menjadi penyebab utama masih tingginya tingkat kemiskinan di beberapa daerah. Kondisi ini berpotensi memengaruhi partisipasi angkatan kerja, karena kemiskinan sering kali mendorong masyarakat untuk bekerja lebih awal, meski dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah (Asmara & Wahed, 2024).

### **Pergerakan Tren Variabel Putus Sekolah di Provinsi Sumatera Selatan**

Putus Sekolah di Provinsi Sumatera Selatan mencerminkan rendahnya keberlanjutan pendidikan di kalangan penduduk usia sekolah, yang berimplikasi langsung terhadap kualitas sumber daya manusia dan produktivitas tenaga kerja di masa depan. Fenomena ini menggambarkan bahwa masih terdapat anak-anak dan remaja yang tidak mampu menyelesaikan jenjang pendidikan formal, baik karena faktor ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Keterbatasan biaya pendidikan, rendahnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya sekolah, serta kebutuhan untuk membantu perekonomian keluarga sering kali menjadi penyebab utama meningkatnya angka putus sekolah. Selain itu, faktor geografis seperti lokasi sekolah yang jauh, kurangnya fasilitas pendidikan, dan kualitas pengajaran yang belum merata turut

memperburuk situasi tersebut. Kondisi ini tidak hanya menghambat peningkatan kompetensi individu, tetapi juga berdampak pada rendahnya kemampuan adaptasi terhadap kebutuhan pasar kerja modern, sehingga memengaruhi daya saing tenaga kerja dan pembangunan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan secara keseluruhan.



Gambar 4. Putus Sekolah di Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan Gambar 4 di atas, tingkat putus sekolah di Provinsi Sumatera Selatan selama periode 2021–2024 menunjukkan tren yang relatif stabil di sebagian besar kabupaten/kota, dengan rata-rata berada pada kisaran 7 hingga 10 persen. Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Lahat tercatat memiliki tingkat putus sekolah yang sedikit lebih tinggi dibandingkan daerah lain, sementara kabupaten seperti Muara Enim, Ogan Komering Ilir, dan Musi Banyuasin menunjukkan angka yang cenderung menurun dari tahun ke tahun. Kota Palembang dan Prabumulih menjadi wilayah dengan angka putus sekolah terendah, yang mencerminkan kondisi sosial ekonomi yang lebih baik serta akses pendidikan yang lebih mudah dijangkau oleh masyarakat (Brunello & Paola, 2014).

Stabilitas dan sedikit penurunan angka putus sekolah di beberapa wilayah menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam memperluas akses dan pemerataan pendidikan, baik melalui program bantuan sosial, beasiswa, maupun peningkatan infrastruktur pendidikan. Namun demikian, masih adanya daerah dengan tingkat putus sekolah yang tinggi menandakan bahwa faktor ekonomi, kesadaran pendidikan, dan kondisi geografis masih menjadi tantangan utama. Banyak siswa di daerah pedesaan atau terpencil yang memilih berhenti sekolah karena harus membantu orang tua bekerja atau karena keterbatasan sarana pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kemajuan telah dicapai, masih diperlukan kebijakan yang lebih terarah untuk menekan angka putus sekolah secara merata di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan (Lindemann & Gangl, 2025).

#### **Hubungan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan**

Hubungan Tingkat Kemiskinan terhadap Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Sumatera Selatan menggambarkan keterkaitan erat antara kondisi sosial ekonomi masyarakat dengan tingkat partisipasi mereka dalam kegiatan ekonomi produktif di berbagai kabupaten/kota. Tingkat kemiskinan menjadi salah satu indikator penting yang mencerminkan kesejahteraan masyarakat dan kemampuan suatu daerah dalam menciptakan lapangan kerja yang inklusif. Variasi tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan bagaimana ketimpangan ekonomi antardaerah berpengaruh terhadap keaktifan masyarakat dalam dunia kerja. Daerah dengan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi cenderung memiliki partisipasi angkatan kerja yang lebih rendah karena keterbatasan akses terhadap pendidikan, pelatihan keterampilan, dan peluang kerja yang layak (Lindemann & Gangl, 2025).

Secara umum, hubungan antara tingkat kemiskinan (TK) dan partisipasi angkatan kerja (PAK) bersifat negatif, sebagaimana terlihat dari hasil estimasi bahwa setiap kenaikan tingkat kemiskinan menyebabkan penurunan partisipasi angkatan kerja. Hal ini disebabkan oleh kondisi di mana individu dari rumah tangga miskin seringkali terhambat dalam memperoleh pendidikan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk masuk ke pasar kerja formal. Kabupaten/kota seperti Palembang, Prabumulih, dan Lubuk Linggau menunjukkan tingkat partisipasi angkatan kerja yang lebih rendah, meskipun merupakan wilayah perkotaan, karena pergeseran struktur ekonomi ke sektor jasa yang menuntut keterampilan lebih tinggi. Sebaliknya, daerah seperti Ogan Ilir, Ogan Komering Ulu Timur, dan Musi Rawas Utara dengan tingkat kemiskinan yang lebih rendah memiliki partisipasi kerja yang lebih tinggi, menandakan adanya

keterlibatan aktif masyarakat dalam sektor pertanian, industri kecil, dan perdagangan lokal (Rammohan & Tohari, 2023).

Temuan ini sejalan dengan teori human capital, yang menyatakan bahwa kemiskinan dan ketimpangan sosial ekonomi dapat menurunkan produktivitas dan partisipasi masyarakat dalam pasar tenaga kerja. Upaya penurunan tingkat kemiskinan melalui peningkatan pendidikan, pelatihan vokasi, dan penyediaan lapangan kerja berkualitas akan berdampak langsung terhadap peningkatan partisipasi angkatan kerja. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan perlu berfokus pada penguatan kapasitas sumber daya manusia dan pemerataan kesempatan ekonomi di seluruh wilayah, agar potensi tenaga kerja dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan (Xayavong & Pholphirul, 2018).

#### ***Hubungan Putus Sekolah di Provinsi Sumatera Selatan***

Hubungan Putus Sekolah terhadap Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Sumatera Selatan mencerminkan keterkaitan antara tingkat pendidikan dengan kemampuan serta kesiapan masyarakat dalam berpartisipasi di pasar kerja. Fenomena putus sekolah menunjukkan adanya hambatan dalam keberlanjutan pendidikan di kalangan penduduk usia produktif, yang secara langsung berdampak pada kualitas sumber daya manusia dan peluang kerja yang tersedia. Di Provinsi Sumatera Selatan, masih terdapat daerah dengan tingkat putus sekolah cukup tinggi, seperti Musi Rawas Utara, Empat Lawang, dan PALI, yang menunjukkan korelasi dengan rendahnya partisipasi angkatan kerja formal. Kondisi ini mengindikasikan bahwa keterbatasan pendidikan menjadi faktor penghambat utama dalam peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja di wilayah tersebut (Sari & Widodo, 2024).

Secara umum, hubungan antara putus sekolah (PS) dan partisipasi angkatan kerja (PAK) bersifat negatif, di mana peningkatan angka putus sekolah akan menurunkan tingkat partisipasi kerja produktif. Hal ini disebabkan karena individu yang tidak menyelesaikan pendidikan formal cenderung memiliki keterampilan terbatas dan sulit bersaing di sektor pekerjaan modern, terutama di bidang industri dan jasa. Daerah dengan angka putus sekolah rendah seperti Palembang, Ogan Ilir, dan Banyuasin memiliki partisipasi kerja yang lebih tinggi karena masyarakatnya relatif lebih terdidik dan memiliki akses terhadap peluang kerja yang lebih luas. Sebaliknya, di daerah dengan angka putus sekolah tinggi, banyak penduduk usia muda terjebak dalam pekerjaan informal atau menganggur karena keterbatasan kompetensi (Bratti, et al., 2022).

Temuan ini sejalan dengan teori modal manusia (Human Capital Theory) menyatakan bahwa pendidikan merupakan investasi penting untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan individu. Oleh karena itu, menurunkan angka putus sekolah di Provinsi Sumatera Selatan menjadi langkah strategis dalam memperluas partisipasi angkatan kerja yang berkualitas. Peningkatan akses pendidikan, pemberian bantuan ekonomi bagi keluarga miskin, serta penguatan program kejar paket dan pelatihan vokasional menjadi kunci dalam memutus rantai rendahnya pendidikan dan partisipasi kerja. Dengan demikian, upaya menekan angka putus sekolah tidak hanya berdampak pada sektor pendidikan, tetapi juga memperkuat struktur ekonomi daerah melalui peningkatan kualitas dan partisipasi tenaga kerja (Asmara & Wahed, 2024).

#### ***Hubungan Tingkat Kemiskinan dan Putus Sekolah Terhadap Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Sumatera Selatan***

Hubungan Tingkat Kemiskinan dan Putus Sekolah terhadap Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Sumatera Selatan mencerminkan keterkaitan antara kondisi sosial ekonomi dan tingkat pendidikan dengan kemampuan penduduk untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi. Tingginya tingkat kemiskinan di beberapa kabupaten seperti Musi Rawas Utara, Empat Lawang, dan PALI berpengaruh terhadap meningkatnya angka putus sekolah, karena banyak keluarga yang lebih memprioritaskan kebutuhan ekonomi jangka pendek dibandingkan melanjutkan pendidikan. Kondisi ini berdampak langsung pada rendahnya partisipasi angkatan kerja produktif dan berkualitas, karena individu yang tidak menyelesaikan pendidikan cenderung memiliki keterampilan terbatas dan hanya mampu bekerja di sektor informal dengan pendapatan rendah (Rammohan & Tohari, 2023).

Secara umum, hubungan antara tingkat kemiskinan (TK) dan putus sekolah (PS) terhadap partisipasi angkatan kerja (PAK) bersifat negatif. Semakin tinggi tingkat kemiskinan dan semakin besar angka putus sekolah, maka semakin rendah pula tingkat partisipasi angkatan kerja formal. Hal ini karena kemiskinan membatasi akses terhadap pendidikan, sementara rendahnya pendidikan menurunkan peluang kerja yang layak dan produktif. Sebaliknya, kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan rendah

dan angka putus sekolah kecil seperti Palembang, Ogan Ilir, dan Banyuasin menunjukkan tingkat partisipasi kerja yang lebih tinggi karena masyarakatnya memiliki bekal pendidikan dan keterampilan yang lebih baik. Temuan ini sejalan dengan teori modal manusia (Human Capital Theory) dan diperkuat oleh penelitian Psacharopoulos bahwa pendidikan merupakan investasi penting dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan ekonomi individu (Xayavong & Pholphirul, 2018).

Dengan demikian, peningkatan partisipasi angkatan kerja di Provinsi Sumatera Selatan tidak dapat dilepaskan dari upaya pengentasan kemiskinan dan penurunan angka putus sekolah. Program pemerintah seperti bantuan sosial, pendidikan gratis, pelatihan vokasional, dan peningkatan akses ekonomi di wilayah pedesaan menjadi langkah strategis untuk memperluas kesempatan kerja dan memperkuat daya saing tenaga kerja lokal. Upaya terpadu ini diharapkan mampu menciptakan siklus positif antara pendidikan, kesejahteraan, dan ketenagakerjaan, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan (Asmara & Wahed, 2024).

### **SIMPULAN**

Tingkat Kemiskinan dan Putus Sekolah terbukti memiliki pengaruh negatif terhadap Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Sumatera Selatan. Hasil analisis menunjukkan bahwa peningkatan tingkat kemiskinan secara signifikan menurunkan partisipasi angkatan kerja, sedangkan variabel putus sekolah juga berpengaruh negatif namun tidak signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa kemiskinan tidak hanya membatasi kemampuan masyarakat untuk memperoleh pendidikan, tetapi juga menurunkan kualitas dan daya saing tenaga kerja di pasar kerja formal. Temuan ini sejalan dengan teori labour supply dan human capital, yang menegaskan bahwa kesejahteraan ekonomi dan pendidikan berperan penting dalam mendorong masyarakat usia produktif untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi. Dengan kata lain, semakin rendah tingkat kemiskinan dan angka putus sekolah di suatu wilayah, semakin besar pula kontribusi penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Secara keseluruhan, peningkatan partisipasi angkatan kerja di Provinsi Sumatera Selatan menuntut kebijakan terpadu antara sektor pendidikan dan ekonomi. Pemerintah perlu memperkuat program pengentasan kemiskinan, memperluas akses pendidikan, serta meningkatkan pelatihan vokasional bagi masyarakat miskin agar mampu bersaing di dunia kerja. Upaya ini sejalan dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) poin ke-8 tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, di mana peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci utama dalam menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan di wilayah Sumatera Selatan.

### **REFERENSI**

- Al Barabasi, H. A., & Atmanti, H. D. (2025). Analisis Dinamika Penetapan UMK: Peran Ekonomi dan Sosial di Sumatera Selatan Periode 2020 – 2024. *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi*, 2(4), 58-68.
- Araafi, F. A., Sadam, M., Tsabitah, K. N., Anindya, R. R., & Fatkhuri. (2024). Kesenjangan Sosial-Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19: Analisis Kritis Terhadap Penyebab dan Dampaknya Pada Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 17(1), 819-829.
- Ariesti, A. E., & Asmara, K. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Pulau Jawa. *Economics and Digital Business Review*, 4(2), 432-438.
- Asmara, K., & Wahed, M. (2024). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Sampang. *Journal of Economics Development Issues*, 7(1), 2614-2384.
- Audilla, Y. F., & Rachmawati, L. (2025). Assessing the Influence of Minimum Wage, Education, and Poverty on the Labor Force Participation Rate: Evidence from Central Java Province. *Journal of Regional Economics Indonesia*, 6(1), 11-18.
- Azizah, R. N., Zauhar, S., & Soeaidy, M. S. (2015). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengurangi Angka Pengangguran di Kabupaten Sampang. *Wacana Journal of Social and Humanity Studies*, 18(3), 203-212.

- Azmi, A. A., & Cholily, V. H. (2023). Analisis Pengaruh Partisipasi Tenaga Kerja dan Pendidikan Perempuan terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2010-2020. *Jurnal Studi Pembangunan*, 2(1), 37-47.
- Bratti, M., Ghirelli, C., & Havari, E. (2022). Vocational training for unemployed youth in Latvia. *Journal of Population Economics*, Volume 35, 677-717.
- Brunello, G., & Paola, M. (2014). The costs of early school leaving in Europe. *Journal of Labor Policy*, 3(22), 1-31.
- Christy, N., Arafat, L. A., Asmara, K., & Bachtiar, A. (2024). Analisis Pengaruh Antara Pendidikan, Kesehatan, Dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Kemiskinan Di Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(19), 678-688.
- Das, S. (2022). Child labour and schooling decision of the marginal farmer households: An empirical evidence from the East Medinipur district of West Bengal, India. *Cornell University*, 1-12.
- Djadjuli, D. (2018). Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 5(2), 8-21.
- Febrianty, A. D., Safara, M. A., Febrianty, N. S., Maulida, V., & Farliana, N. (2025). Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Proporsi Ketenagakerjaan Tahun 2024. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital*, 2(3), 1996-2002.
- Fitria, D., & Novita, D. (2024). Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Aceh. *Journal Transformation of Mandalika*, 5(12), 433-439.
- Ghignoni, E., Croce, G., & d'Ambrosio, A. (2019). University dropouts vshigh school graduates in the school-to-work transition Who is doing better? *International Journal of Manpowe*, 40(3), 449-472.
- Handayani, T. (2015). Relevansi Lulusan Perguruan Tinggi Di Indonesia Dengan Kebutuhan Tenaga Kerja di Era Global. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 10(1), 53-64.
- Iswara, D., Suasti, Y., Iskarni, P., Putri, H. A., & Wulandari, F. I. (2023). Analisis Tingkat Pendidikan Terhadap Partisipasi Angkatan Kerja Dan Jumlah Kemiskinan Di Kota Pagar Alam. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 5(3), 3917-3922.
- Korotaj, T., Chen, J. M., & Kurnoga, N. (2024). School-to-Work Transition in the Youth Labor Market in Central and Eastern Europe: A Cluster Analysis Approach. *Business Systems Research*, 15(2), 101-139.
- Lindemann, K., & Gangl, M. (2025). How does a poor labour market affect inequalities in access to postsecondary education? Empirical evidence from 31 affluent countries. *Socio-Economic Review*, 23(1), 257-282.
- Meytriana, A., Azahra, G. M., Khasanah, K. M., & Audinia, P. (2025). Peran Ekonomi Politik Dalam Menanggulangi. *Journal Of Business, Economics, And Finance*, 478-493.
- Mussida, C., Sciulli, D., & Signorelli, M. (2019). Secondary school dropout and work outcomes in ten developing countries. *Journal of Policy Modeling*, 4(4), 547-567.
- Nursalamah. (2025). Analisis Hubungan Upah Minimum Regional dan IPM terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Mandailing Natal. *Jurnal Riset Ilmiah*, 4(10), 2879-2891.
- Rahmayani, Z. P., Syarif, M., & Suriadi, L. O. (2025). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kesempatan Kerja, dan Angkatan Kerja Terhadap Pengangguran di Sulawesi Tenggara. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan*, 10(1), 380-392.
- Rammohan, A., & Tohari, A. (2023). Rural poverty and labour force participation: Evidence from Indonesia's Village fund. *Plos One*, 18(6), 1-15.

- Sagara, R., Setiawan, A. H., Almuzafir, & Purnawan, E. (2025). Dinamika Kependudukan dan Ketenagakerjaan: Tantangan dan Kebijakan Berkelanjutan untuk Indonesia. *Jurnal Alwatzikhoebillah*, 11(1), 317-329.
- Xayavong, T., & Pholpirul, P. (2018). Child labour and school dropout in least-developed countries: empirical evidence from Lao PDR. *International Journal of Education Economics and Development*, 9(1), 1-23.